

**INOVASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI
GEMA GEMPUR: GEBRAKAN MAHASISWA GENERASI PERUBAHAN
(Studi pada Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang)**

Mochammad Rozikin

Abstrak : Indonesia sebagai negara berkembang saat ini memiliki salah satu persoalan pembangunan, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu kondisi ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu akar permasalahan yang dialami oleh salah satu desa di Kabupaten Malang, yaitu Desa Sumberpetung. Berbagai macam program untuk mengentaskan kemiskinan yang diberikan pada oleh pemerintah pada saat ini belum berdampak signifikan terhadap kemiskinan di Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Sehingga dibutuhkan inovasi program yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan pembangunan kerakyatan sebagai salah satu solusi pemecahan masalah kemiskinan. Gema Gempur: Gebrakan Mahasiswa Generasi Perubahan adalah inovasi program berbasis pembangunan kerakyatan yang mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pembangunan, Partisipasi, Inovasi Program.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pada sebuah negara. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Definisi kemiskinan yang lain yaitu ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Berbagai macam upaya untuk menganalisis penyebab kemiskinan telah diungkapkan oleh para ahli untuk dapat memecahkan masalah kemiskinan, khususnya di negara berkembang.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah angka kemiskinan pada September 2018 sebesar 25.674.580 jiwa atau sebesar 9,66% dari total populasi penduduk (BPS, 2018). Kondisi kemiskinan di Indonesia mendapatkan perhatian khusus, utamanya dari pemerintah untuk terus ditekan sehingga angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang. Dari 33 provinsi yang ada, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan cukup tinggi, yaitu sebesar 4.292.150 jiwa atau setara dengan 10,85%. Oleh karena hal tersebut, dibutuhkan salah satu konsep untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui agenda pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nations Building*) (Siagian, 1994 dalam Nurcholis dkk 2016:6). Selain itu, Ginanjar Kartasasmita (1994) dalam Nurcholis dkk (2016:6) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan dalam rangka kemiskinan adalah hal

penting bagi sebuah Negara yang direncanakan untuk mengubah suatu keadaan miskin (kurang baik) menuju keadaan yang mandiri atau tidak miskin (lebih baik).

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui program-program pembangunan desa untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti contoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Muslim (2017) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin” menyimpulkan bahwa kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) disebabkan karena buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan *stakeholders* memahami tujuan atau kesalahan pada pemilihan prioritas program. Sedangkan menurut Noor (2014) dalam penelitian yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia” menyimpulkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) cenderung sudah baik atau berhasil. Sehingga dapat disimpulkan perlu adanya kajian dan analisis mendalam tentang efektivitas program-program yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, khususnya di daerah.

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 2.977,05 km² (Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Malang). Salah satu permasalahan atau isu strategis yang ada pada Kabupaten Malang saat ini adalah kemiskinan. Kabupaten Malang sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Timur memiliki angka kemiskinan penduduk yang cukup tinggi, bahkan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Jumlah total penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 283.960 jiwa (2017) dengan angka persentase kemiskinan mencapai 11,04% (2017).

Dalam menanggapi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Malang, maka diperlukan adanya analisis dan kajian mendalam tentang bagaimana kondisi kemiskinan di Kabupaten Malang. Selain itu, dibutuhkan program-program untuk dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Kajian Teori

Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan (Supriatna, 1997). Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila timbul persoalan seperti pendidikan, produktivitas, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya tergolong rendah sehingga dapat disebut sebagai ketidakberdayaan. Penyebabnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang ada, dalam lingkup pendidikan formal dan nonformal sehingga menimbulkan konsekuensi pendidikan informal yang rendah.

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Diantaranya yaitu: 1) tidak memiliki faktor produksi, 2) Tidak memperoleh kemungkinan memiliki aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan rendah, 4) Tidak adanya fasilitas, dan 5) Usia muda dengan tidak didukung oleh keterampilan atau pendidikan yang baik.

Selain itu, terdapat dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu:

- 1) Kemiskinan *absolut*, adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan

- 2) Kemiskinan *relatif*, adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Dapat dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial

Strategi penanggulangan kemiskinan dapat berupa pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Korten (dalam Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa ada tiga hal mendasar yang dapat dilakukan dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

- 1) Fokus dan tindakan kebijakan pemerintah yang *supportive*
- 2) Mengembangkan struktur dan proses organisasi dalam kaidah sistem
- 3) Mengembangkan sistem produksi-konsumsi secara teritorial dan terkontrol

Pembangunan

Ginanjar Kartasasmita (1994) dalam Nurcholis dkk (2016:6) mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dalam konteks pedesaan, pembangunan memiliki pergeseran paradigma dari pembangunan yang terpusat hingga pembangunan yang otonom (kemampuan wilayah). Sumpeno (2011) menekankan bahwa dorongan perbaikan sistem pemerintahan dan perencanaan yang lebih reintegrasi dapat terjadi jika terdapat pembangunan dari pusat ke desa secara langsung dan baik. Dengan mempertimbangkan karakteristik kemajemukan, demokratis, jangka panjang, transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat.

Pembangunan, khususnya pembangunan desa di Indonesia telah diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa saat ini mengalami dinamika yang berbeda-beda, salah satunya adalah konsep pembangunan yang berpusat pada manusia. Sumpeno (2011) saat ini desa menjadi tempat untuk berdemokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi masyarakat. karena pembangunan masyarakat pedesaan ditujukan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik yang dilatarbelakangi berdasarkan sejarah, hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

Penyusunan dan perumusan pendekatan pembangunan memiliki sifat menyeluruh. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan (Sumpeno, 2011), diantaranya:

1. Perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan memiliki upaya untuk meletakkan format, tatanan, dan kelembagaan masyarakat desa yang berbasis pada nilai, budaya, historis, dan tatanan hidup masyarakat.
2. Pembangunan bersifat umum yang diberlakukan secara seragam yang pada kenyataannya tidak memiliki keberhasilan dan tidak memiliki sasaran

Pemberdayaan dan Partisipasi

Pemberdayaan adalah unsur-unsur yang berasal dari luar tatanan hidup yang sedang melakukan upaya dengan tujuan untuk memperbaiki tatanan tersebut sehingga dapat berkembang dengan baik dan mandiri (Sumpeno, 2011). Sehingga pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan kepada suatu tatanan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Upaya pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan, khususnya pada pembangunan desa dapat dianalisis dari setiap tahapan yang masuk ke dalam proses pemberdayaan masyarakat desa harus dilakukan secara desentralisasi.

Terdapat dua prinsip dasar yang selayaknya dianut dalam proses pemberdayaan, diantaranya:

- 1) Menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri
- 2) Mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang atau peluang yang tercipta.

Dari kedua upaya ini diharapkan akan mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga terangsang untuk melakukan dan membantu pemerintah dalam rangka pembangunan desa yang akan memunculkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan jargon politik, studi dari World Bank, IMF dan UNHCR (Abdul A.S, 2002 dalam Sumpeno, 2011) menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya ternyata lebih baik dari tata cara konvensional yang bersifat *top down*. Proses pelibatan masyarakat dalam konteks proses pembangunan sangat penting untuk dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh dengan membangun proses interaksi, kerja sama dan pembagian peran.
- 2) Masyarakat memiliki informasi yang penting untuk merencanakan program yang lebih baik, dari tujuan, pengetahuan, situasi dan kondisi.

Inovasi Program

Inovasi adalah gagasan dari munculnya ide/barang baru yang berasal dari sumber daya yang ditujukan untuk mempercepat proses memenuhi kebutuhan. Beberapa pengertian inovasi yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya Huberman dalam Sa'ud (2014) menjelaskan bahwa inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan dan peperangan manusia dan sumber – sumber material baru atau menggunakan cara unik yang akan menghasilkan peningkatan pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan. Sumpeno (2011) turut menegaskan bahwa inovasi merupakan dasar dari terciptanya keunggulan kompetitif. Dalam lingkungan yang dinamis, inovasi diarahkan pada terciptanya proses yang lebih cepat, lebih diterima, lebih baik dan lebih murah.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dianalisa tentang karakteristik dari inovasi, diantaranya yaitu:

- 1) Baru, yaitu inovasi dapat memenuhi sesuai yang belum pernah ada
- 2) Kesengajaan, secara dengan sengaja dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
- 3) Terprogram, inovasi dibuat secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan jelas

Selain itu, dalam pengaplikasiannya, inovasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: inovasi produk (*Products innovation*) untuk memunculkan produk baru, inovasi dalam pelayanan (*Service innovation*) untuk memberikan pelayanan yang belum pernah ada sebelumnya kepada pelanggan, dan inovasi proses (*process innovation*) untuk memberikan cara baru dalam proses menghasilkan produk tertentu.

Keterkaitan inovasi dengan program yang dilakukan pemerintah dalam rangka pembangunan yang suatu cara atau ide baru yang dilakukan melalui upaya-upaya yang terstruktur dalam rangka pembangunan desa. Inovasi program disesuaikan dan mengarah kepada visi, misi, sasaran, serta tujuan yang ingin dicapai. Sehingga inovasi program menjadi salah satu produk untuk dapat mengembangkan tatanan kehidupan bermasyarakat menuju lebih baik.

PEMBAHASAN

Jawa Timur merupakan salah satu daerah provinsi di Pulau Jawa dengan total luas wilayah 47.922 km² dan jumlah penduduk sebesar 39.292.972 jiwa pada tahun 2017.

Jawa Timur adalah satu satunya provinsi dengan wilayah yang paling luas di antara 6 provinsi lain di Pulau Jawa. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan provinsi yang paling luas di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki persoalan yang besar, salah satu persoalan saat ini yaitu tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dari 33 provinsi yang ada, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan cukup tinggi, yaitu sebesar 4.292.150 jiwa atau setara dengan 10,85% (BPS, 2018). Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yang mengalami kemiskinan. Sehingga diperlukan adanya arah pembangunan yang sesuai untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Jawa Timur.

Berbagai macam upaya yang telah dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah pusat untuk dapat mengentaskan kemiskinan melalui program-program. Diantaranya terdapat 7 program dari Presiden Joko Widodo untuk dapat mengentaskan kemiskinan, yaitu:

- 1) Program Indonesia Pintar (PIP)
- 2) Program Indonesia Sehat (PIS)
- 3) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 4) Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan
- 5) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 6) Program Dana Desa
- 7) Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)

Dari keseluruhan upaya-upaya yang dilakukan melalui program yang disusun pemerintah menghasilkan satu hal yang kurang berdampak signifikan terhadap kemiskinan di salah satu daerah di Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Letak geografis tersebut menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi strategis yang ditandai dengan keramaian kota akibat mobilitas arus transportasi. Ibukota dari Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin (dalam ratus ribu) Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kabupaten Malang	288,6	280,30	292,87	293,74	283,96
2	Kabupaten Jember	278,5	270,40	269,54	265,10	266,90
3	Kabupaten Probolinggo	238,7	231,90	236,96	240,47	236,72
4	Sampang	248,2	239,60	240,35	227,80	225,13
5	Sumenep	225,5	218,90	216,84	216,14	211,92

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2018

Dari data tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Setelahnya terdapat Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Sampang, dan Sumenep. Kabupaten Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur hanya memiliki tingkat kemiskinan sebesar 138,54 (BPS, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Malang memiliki urgensi kemiskinan yang cukup tinggi dalam persoalan kemiskinan.

Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan/desa. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Kalipare. Kecamatan Kalipare memiliki jumlah penduduk sebesar 68.944 jiwa yang terbagi menjadi 9 desa, 38 dusun, 61 RW dan 460 RT. Dilihat dari komposisinya, Desa Kalipare memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu sebanyak 7 dusun. Banyaknya jumlah dusun yang dimiliki secara otomatis menjadi daerah dengan Rukun Tetangga terbanyak pula. Salah satu desa yang terdapat pada Kecamatan Kalipare yaitu Desa Sumberpetung.

Desa Sumberpetung adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang dengan total jumlah penduduk pada tahun 2017 sejumlah 7.439 jiwa (BPS, 2018). Berkaitan dengan kondisi perekonomian, penduduk Desa Sumberpetung sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas beragama Islam juga memiliki kepatuhan terhadap adat istiadat dan tradisi keagamaan. Oleh karena itu, arah pembangunan masyarakat desa juga diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada peradaban sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang.

Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Desa Sumberpetung Tahun 2015

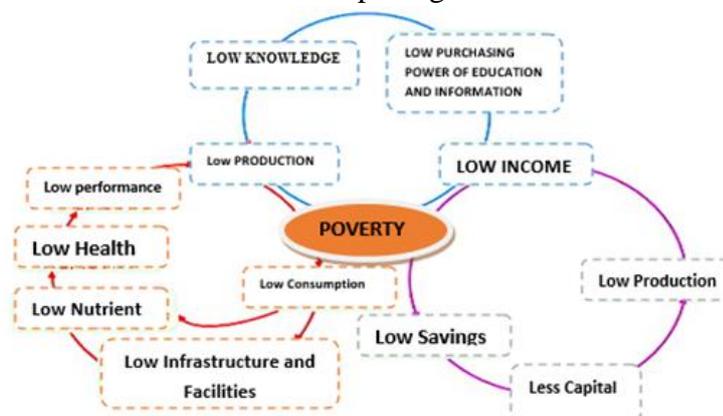
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak sekolah/buta huruf	520
2	Tidak tamat SD/Sederajat	1950
3	Tamat SD/Sederajat	2470
4	Tamat SLTP/Sederajat	1975
5	Tamat SLTA/Sederajat	845
6	Tamat D1, D2, D3	68
7	Sarjana/S-1	56
8	Lulus S2	2
JUMLAH		7886

Sumber: Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang tidak mengemban pendidikan cukup banyak, yaitu sebesar 520 orang ditambah dengan data tidak tamat SD/Sederajat sebesar 1950 orang. Jika dijumlah, maka data orang – orang yang belum mendapatkan pendidikan menyentuh angka 2470 orang. Selain itu, data pemuda 13 tahun – 15 tahun sebesar 288 orang, 16 tahun – 18 tahun 379 orang, dan 19 tahun – 25 tahun sebesar 749 orang (Data Potensi Sosial Ekonomi, 2015). Data diatas dapat dikatakan cukup memprihatinkan karena pemuda sebagai generasi bangsa yang seharusnya dapat menjadi regenerasi untuk membawa perubahan di masa mendatang. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Sumberpetung dengan angka

tidak tamat yang cukup tinggi dapat menimbulkan salah satu aspek permasalahan lain yang berpotensi sebagai salah satu urgensi dari Kabupaten Malang, yaitu kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan serius yang tidak hanya dialami oleh Desa Sumberpetung, akan tetapi Kabupaten Malang secara keseluruhan. Bahkan, beberapa tahun lalu Desa Sumberpetung menjadi salah satu desa tertinggal berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang) akibat dari kurangnya infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena hal tersebut, dapat dikatakan dibutuhkan peran pemuda, terutama di Desa Sumberpetung untuk memaksimalkan potensi yang ada dan memajukan Desa. Salah satu cara untuk dapat memaksimalkan peran pemuda di Desa Sumberpetung serta mengentaskan kemiskinan yaitu melalui aspek pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran pendidikan bagi pemuda untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Sumberpetung.



Gambar 1. Model Lingkaran Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty)

Sumber: Ragnar, 1953

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mengawali terjadinya kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan mulanya berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Penjelasan tersebut diungkapkan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan pada tahun 1953 yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor) (Kuncoro, 2004: 157).

Faktor-faktor atau penyebab ini pada dasarnya saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai salah satu hal yang harus diutamakan. Jika mengacu pada gambar tersebut, penyebab kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan. Sehingga dapat disimpulkan satu-satunya cara yang tepat untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Sumberpetung berdasarkan data dan potensi yang dimilikinya, yaitu melalui Pendidikan. Pendidikan akan menjadi salah satu dasar atau

akar dari semua permasalahan yang ada di Desa Sumberpetung jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 lalu.

Korten (dalam Hikmat, 2004:15-16) menjelaskan bahwa ada tiga upaya dasar yang dapat dilakukan secara perubahan struktur dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Dengan demikian, model pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (empowerment). Selain itu, salah satu identifikasi penyebab suatu daerah terjerat kemiskinan adalah karena tiga faktor, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi yang disebut dengan lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan ini adalah sebuah konsep yang menjerat sebuah daerah menjadi daerah dengan kemiskinan yang cukup tinggi atau cukup parah.

Pembangunan desa adalah upaya yang dilakukan dengan adanya gerakan bersama untuk perubahan tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi aspek-aspek kebutuhan hidup, baik lahir maupun batin yang dilakukan secara swadaya dengan kebutuhan masyarakat desa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa sebelum masuk kepada suatu inovasi atau gerakan bersama, perlu adanya analisis penyebab Desa Sumberpetung pernah menjadi desa tertinggal karena kurangnya infrastruktur yang memadai disertai kondisi perekonomian. Data tingkat pendidikan di Desa Sumberpetung dapat diterjemahkan sebagai salah satu akar permasalahan tingginya kemiskinan yang ada, khususnya di Desa Sumberpetung.

Terbatasnya Akses Pendidikan

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang menjelaskan bahwa Desa Sumberpetung tidak memiliki akses pendidikan SLTA/Sederajat. Tidak ada SLTA/Sederajat yang dapat menjangkau Desa Sumberpetung. Dengan kata lain, bahwa anak-anak yang lulus pada tahapan SD dan SLTA/Sederajat diharuskan mencari sekolah lain jika ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini menjadi salah satu kelemahan bagi Desa Sumberpetung karena keterbatasan akses pendidikan yang mengharuskan anak-anak pergi ke desa lain dengan keterbatasan ekonomi untuk tetap bersekolah. Sehingga kekhawatiran lain muncul tentang keamanan dan kenyamanan pendidikan yang belum tentu terjamin baik.

Selain itu, data murid SMA/Sederajat di Kecamatan Kalipare hanya sebesar 408 yang terdiri dari 218 anak laki-laki dan 190 anak perempuan. Bertolak belakang dengan kondisi Kecamatan Kalipare dengan desa/dusun terbanyak dalam satu kecamatan.

Sejalan dengan permasalahan tersebut maka peningkatan partisipasi sekolah harus diimbangi dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga guru yang memadai. Sehingga dapat dikatakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kalipare, khususnya Desa Sumberpetung belum dioptimalkan dengan baik.

Infrastruktur Kesehatan Kurang Memadai

Data dari beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Kalipare, khususnya Desa Sumberpetung didominasi oleh Posyandu yaitu sebanyak 57 lokasi. Fasilitas yang lain yaitu puskesmas 4 buah, tempat praktek dokter 3 buah, ponkesdes sebanyak 6 buah, dan tempat praktek bidan sebanyak 11 buah. Sedangkan tenaga medis di Kecamatan Kalipare cukup memprihatinkan yaitu hanya terdiri dari 3 dokter, 9 mantri, 11 bidan, 34 dukun bayi terlatih dan 10 dukun bayi tidak terlatih. Sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur kesehatan dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan karena tenaga medis yang terbatas dengan infrastruktur yang memadai dirasa belum cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare.

Perekonomian bergantung dari Hasil Pertanian dan Peternakan

Sumber mata pencaharian penduduk Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare adalah pertanian. Dengan total luas lahan mencapai 158 Ha dari total luas tanah Kecamatan Kalipare sebesar 1.681 Ha. Optimalisasi potensi Desa Sumberpetung melalui pertanian yaitu dengan tanaman jagung dan tebu. Selain itu, mayoritas masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani ini juga memiliki peternakan. Di Kecamatan Kalipare sendiri memiliki hasil ternak yang diklasifikasikan dan dibedakan menjadi unggas (1.259.011 ekor), ternak kecil (12.995 ekor), ternak besar (5.802 ekor).

Apabila musim-musim tertentu datang, maka hasil pertanian dan peternakan Desa Sumberpetung bukan menjadi prioritas. Masyarakat akan mencari pekerjaan sampingan lain sambil menunggu hasil panen yang memuaskan dan dapat memberikan keuntungan. Masyarakat tidak dapat bergantung kepada sumber daya lain untuk meningkatkan nilai perekonomian dikarenakan kondisi geografis dari Desa Sumberpetung dirasa kurang menguntungkan masyarakat.

Strategi dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Sumberpetung

Pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan merupakan salah satu pendekatan penting dalam tujuan pembangunan, khususnya pembangunan desa dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dengan mengedepankan nilai-nilai tatanan masyarakat desa tanpa meninggalkan struktur sosial budaya dan nilai kemasyarakatan, pembangunan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan desa.

Pendidikan merupakan salah satu cara dalam memutuskan lingkaran kemiskinan. Dimana dengan adanya pendidikan yang baik maka dapat meningkatkan Human Capability. Daerah dengan angka kemiskinan tinggi merupakan daerah yang memiliki banyak hambatan dalam meningkatkan upaya pelaksanaan pelayanan, terutama pelayanan pendidikan yang baik. Yang mana dalam perencanaan hingga pelaksanaannya memiliki banyak hambatan. Oleh karenanya dalam mewujudkan

pendidikan yang baik bagi daerah yang kemiskinannya tinggi perlu dilakukan secara terencana.

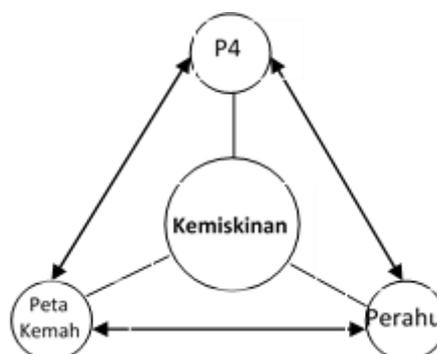
Peran pemuda sangat dibutuhkan di dalam pembangunan bangsa dalam segala bidang dan aspek kehidupan, sehingga apabila Human Capability pemuda belum mencapai nilai yang baik, maka pembangunan bangsa tentu akan mengalami kesulitan. Maka dari itu pengembangan pendidikan bagi pemuda sebagai generasi perubahan perlu dilakukan sebagai peningkatan Human Capability sebagai upaya pembangunan daerah yang mengalami kemiskinan tinggi. Dengan ini, maka inovasi program yang ditawarkan adalah tentang keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu elemen pendukung berjalannya pembangunan Desa Sumberpetung.

Dengan idealisme dan semangat tinggi dari para mahasiswa, diharapkan akan membantu masyarakat untuk memahami dan menyadarkan tentang aspek pendidikan di masa yang akan mendatang. Tentu saja, didukung dengan Universitas yang ada di Malang Raya menjadikan inovasi ini sebagai salah satu garda terdepan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Malang.

Gema Gempur: Gebrakan Mahasiswa Generasi Perubahan.

Mengacu pada konseptual tersebut, maka inovasi program yang dapat dilakukan adalah kegiatan pengembangan potensi pemuda melalui Gema Gempur: Gebrakan Mahasiswa Generasi Perubahan.

- 1) Tujuan: untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemuda yang menekankan pada pola pikir kritis serta idealisme sebagai pemuda. Sasaran dari inovasi program Gema Gempur adalah untuk terwujudnya desa yang mandiri dan maju dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Desa Sumberpetung.
- 2) Sasaran: Peningkatan kapasitas Pemuda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dapat memajukan daerah kemiskinan dengan program pelatihan pengembangan.
- 3) Kegiatan Pokok: Kegiatan atau Program Gema Gempur yang terdiri dari tiga tahapan atau program khusus untuk pemuda yang diharapkan untuk mengatasi kemiskinan melalui peran mahasiswa dengan cara memberikan pendidikan formal dan informal kepada anak-anak dan pemuda Desa Sumberpetung.



Gambar 2. Model Inovasi Program Gema Gempur: Gebrakan Mahasiswa Generasi Perubahan
Sumber: Olahan Penulis

P4 (Pembinaan, Pembelajaran dan Pelatihan Profesi)

Merupakan kegiatan tahap 1 dimana generasi muda akan di petakan berdasarkan minat atau profesi serta pendidikan dasar dan akan di bina dan di latih oleh tenaga Pendidik Mahasiswa sesuai dengan Program studi yang di tempuh pada pendidikan tinggi masing-masing. Kegiatan ini bersifat formal dan informal yang ditujukan kepada masyarakat, dengan pendidikan materi terhadap profesi yang digeluti.

Adanya berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Desa Sumberpetung harus dapat dioptimalkan dengan baik melalui program-program yang positif. Kegiatan P4 yang ditujukan kepada pemuda Desa Sumberpetung merupakan langkah awal yang menjadi batu loncatan sehingga mengetahui potensi diri dan kemampuan dalam rangka memajukan desa.

Perahu (Praktik dan Usaha)

Merupakan Kegiatan Tahap ke-2 setelah kegiatan P4 dimana para pemuda yang telah menempuh P4 akan melaksanakan praktik lapangan sesuai dengan pengetahuan yang telah didapatkan pada kegiatan sebelumnya. Pada tahap ini, bukan hanya sekedar praktik percobaan namun pendirian usaha atau proses pekerjaan benar-benar dijalankan. Para pemuda akan didampingi dan diawasi secara langsung oleh Mahasiswa yang sesuai dengan Program Studinya. Sehingga Usaha atau profesi yang dilakukan seolah-olah didirikan atau dilakukan kerjasama antara keduanya secara langsung.

Proses pendampingan dengan kerja sama dan kolaborasi dengan aparat desa beserta stakeholders lainnya akan sangat mendukung berbagai kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh Desa Sumberpetung. Selain itu, Karang Taruna di Desa Sumberpetung juga akan dilibatkan dalam kegiatan untuk menambah pengetahuan dan daya dukung terhadap kegiatan yang melibatkan pemuda di Desa Sumberpetung.

Praktik dan Usaha ini menekankan tentang nilai produksi dan harga jual sesuai dengan keahlian para pemuda. Para pemuda yang orangtuanya mayoritas bertani jagung akan memanfaatkan jagung tersebut untuk kemudian diberikan kepada masyarakat dan produksi yang memiliki nilai jual seperti stik jagung, bahan kerajinan, dan lain-lain untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Peta kemah (Pelepasan tanggung jawab dan kemandirian usaha)

Pada tahap ini Mahasiswa melepaskan tanggung jawabnya dalam mendampingi masyarakat usaha, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap mahasiswa dapat sedikit demi sedikit dihilangkan. Tentu saja, dengan pengontrolan dan pengawasan intensif yang dilakukan. Apabila dibutuhkan, dibutuhkan jadwal terstruktur untuk dapat berkomunikasi dengan para pemuda sehingga dapat memberikan channel atau daya dukung membeli produk hasil dari pengembangan pemuda.

PENUTUP**Kesimpulan**

Program Inovasi *Gema Gempur: Gebrakan Mahasiswa Generasi Perubahan* merupakan salah satu konsep untuk dapat menjawab tantangan pada permasalahan lingkaran setan kemiskinan yang mana fokus utama untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan formal merupakan salah satu

hal wajib yang harus ditempuh bagi para pemuda Desa Sumberpetung. Sedangkan pendidikan informal adalah pendukung dari pendidikan formal yang memberikan nilai tambah tersendiri. Masuknya peran pemuda sebagai penggerak utama sektor pendidikan yang diharapkan dapat membantu Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang menjadi desa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menstimulus pemuda Desa Sumberpetung terhadap pentingnya pendidikan dan memunculkan kesadaran serta memotivasi mereka dalam membuat suatu inovasi dalam memajukan desa.

Saran

Inovasi Program Gema Gempur: Gebrakan Mahasiswa Generasi Perubahan dapat memberikan saran berupa:

1. Optimalisasi potensi Pemuda di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang dengan menstimulus kesadaran pendidikan yang penting bagi tingkat kesejahteraan masyarakat desa
2. Sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab atas segala yang terjadi pada suatu daerah, terutama pemerintah daerah.

Kegiatan positif yang dapat mengembangkan peran pemuda di Desa Sumberpetung dapat berdampak kepada seluruh aspek, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2018. *Kecamatan Kalipare Dalam Angka 2018*. BPS. Kabupaten Malang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2018. *Kabupaten Malang Dalam Angka 2018*. BPS. Kabupaten Malang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2018. *Statistik Daerah Kabupaten Malang 2018*. BPS. Kabupaten Malang
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018*. BPS. Indonesia
- Dokumen Desa Sumberpetung. 2017.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Bandung.
- Kadji, Yulianto. 2012. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.
- Kartasasmita. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, BAPPENAS: Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram : Penerbit BAPPEDA Provinsi NTB
- Muslim, Aziz. 2017. *Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin*. Jurnal Penyuluhan. Vol. 13. 80 – 87
- Noor, Munawar. 2014, *Penganggulan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah. UNTAG: Semarang. 130 – 141

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
- Syaefudin Sa'ud, Udin. 2014. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Reinforcement Analysis and Development. Banda Aceh
- Suparno, A. Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wajhudin, dalam Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 266-267